



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

INSPEKTORAT PROVINSI

Jl.Nipah No.51 Telp. (0751) 31961 – 39263, Fax : (0751) 31841

e-mai : bawasda@sumbarprov.go.id

LAPORAN HASIL EVALUASI PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI (PMPRB) INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016

I. Dasar Pelaksanaan

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 Tanggal 2 Januari 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
- Peraturan Menpan dan RB No. 31 Tahun 2012 tentang Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah
- Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 700-31-2015 Tanggal 26 Januari 2015 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
- Keputusan Inspektur Provinsi Sumatera Barat Nomor : 700/06/SK-Insp/2016 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Inspektorat Provinsi Sumatera Barat

II. Tujuan PMPRB

- Memperoleh informasi tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Internal Instansi Pemerintah
- Menggambarkan Pelaksanaan dan Pencapaian Reformasi Birokrasi di Lingkungan Internal Instansi Pemerintah
- Memonitor rencana aksi tindak lanjut hasil penilaian mandiri di lingkungan Internal Instansi Pemerintah

III. Ruang Lingkup Penilaian

- Penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan internal instansi pemerintah
- Penilaian terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan dengan mempertimbangkan upaya yang telah dilakukan sampai dengan saat terakhir pembahasan hasil penilaian

IV. Kelompok Kerja PMPRB dibentuk dengan Keputusan Inspektur Provinsi Sumatera Barat Nomor 700/06/SK-Insp/2016 tanggal 4 Mei 2016 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------------|--------------------|
| 1. H. Erizal,SH | (Penanggung Jawab) |
| 2. Hj. Betty Vetrica, SE, M.Si | (Ketua Pelaksana) |
| 3. Mira Susanti, SE, M.Si | (Koordinator) |
| 4. Hj. Erita, S.Pd I | (Anggota) |

- | | |
|------------------------|-----------|
| 5. Ardiansyah, SE | (Anggota) |
| 6. Vivi Pratiwi, S.STP | (Anggota) |
| 7. Elsy Hamelia, Amd | (Anggota) |
| 8. Mutia Ramatri, Amd | (Anggota) |
| 9. Raswan | (Anggota) |

HASIL PENILAIAN PMPRB

Evaluasi dilakukan terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam penerapan reformasi birokrasi. Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran atau hasil berupa peningkatan kapabilitas dan akuntabilitas kinerja, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, dan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Penilaian Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dilakukan pada 5 (lima) SKPD yang didasari dari penilaian Komponen Pengungkit dan Hasil yaitu :

1. Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat
2. Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat
3. Biro Humas Setda Provinsi Sumatera Barat
4. Inspektorat Provinsi Sumatera Barat
5. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat

Penilaian Reformasi Birokrasi:

A. Langkah Penilaian RB:

Penilaian dan penyimpulan penilaian atas kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi sebagai berikut :

- a. Penilaian menyimpulkan hasil penilaian atas fakta objektif instansi pemerintah dalam melaksanakan program reformasi birokrasi sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam Lembaran Kerja.
- b. Langkah penilaian dilakukan sebagai berikut :
 - 1) Dalam melakukan penilaian terdapat 3 (tiga) variable yaitu : Komponen, Sub-Komponen dan Kriteria
 - 2) Setiap komponen dan sub-komponen penilaian diberikan alokasi nilai sebagai berikut :

No	Komponen	Bobot	Sub-Komponen
1	Komponen Pengungkit	60 %	a. Manajemen perubahan (5%) b. Penetaan Peraturan Perundang-undangan (5%) c. Penataan dan Penguatan Organisasi (6%) d. Penataan Tatalaksana (5%) e. Penataan sistem manajemen SDM (15%) f. Penguatan akuntabilitas (6%) g. Penguatan pengawasan (12%) h. Peningkatan kualitas pelayanan publik (6%)
2	Komponen Hasil	40%	a. Kapasitas dan akuntabilitas organisasi (20%) b. Pemerintah yang bersih dan bebas KKN (10%) c. Kualitas pelayanan publik (10%)
Total		100%	

c. Penyimpulan atas hasil penilaian mandiri

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90 – 100	Istimewa
2	A	>80 – 90	Memuaskan
3	BB	>70 - 80	Sangat baik
4	B	>60 - 70	Baik , perlu sedikit perbaikan
5	CC	>50 -60	Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
6	C	>30 -50	Kurang, perlu banyak perbaikan. Termasuk perubahan yang mendasar
7	D	>0 - 30	Sangat Kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar

B. Hasil Penilaian RB (Sementara):

Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 adalah **71,51** atau kategori **"BB"**. Indeks Reformasi Birokrasi ini merupakan persentase capaian pelaksanaan reformasi birokrasi dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen Penilaian	Nilai Maks	Nilai 2016	% Capaian
1.	Komponen Pengungkit			
	1. Manajemen Perubahan	5,00	4,42	88,45
	2. Penataan Peraturan Perundang-undangan	5,00	3,13	62,5
	3. Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	4	66,67
	4. Penataan Tatalaksana	5,00	3,42	68,45
	5. Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	14,86	99,05
	6. Penguatan Akuntabilitas	6,00	4	66,67
	7. Penguatan Pengawasan	12,00	9,44	78,7
	8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	4,94	82,33
	Total Komponen Pengungkit	60,00	48,21	80,35
2.	Komponen Hasil			
	1. Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	20,00	9,87	49,36
	2. Pemerintah Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	6,5	65,0
	3. Kualitas Pelayanan Publik	10,00	6,93	69,25
	Total Komponen Hasil	40,00	23,3	77,66
	Indeks RB	100	71,51	

Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi berupa entrian data secara elektronik telah dikirim ke Menpan melalui website ***pmprb.Menpan.go.id*** secara online.

Demikian laporan ini agar dapat digunakan seperlunya.

Sekretaris,

Hj. BETTY VETRIA, SE, Msi, CFA
Pembina Tingkat I
NIP. 19720215 199803 2 003

**EVALUASI PENILAIAN PELAKSANAAN MANDIRI
REFORMASI BIROKRASI**

No	Indikator Penilaian	Dokumen Yang Belum Dilengkapi
I	Badan Kepegawaian Daerah (BKD) :	
1.	Pengembangan pegawai berbasis kompetensi	
	1.Telah dilakukan Assesment pegawai.	MoU pemetaan assesment pegawai.
2.	Penetapan kinerja individu	
	1.Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik	Pengukuran kinerja individu bulanan.
II	Biro Organisasi	
1.	Manajemen Perubahan	
	1. Penyusunan Road Map telah melibatkan seluruh unit organisasi.	Undangan Roap Map, daftar hadir, laporan pelaksanaan kegiatan.
2.	Penataan dan Pengetahuan Organisasi	
	A. Evaluasi	
	1. Telah dilakukan evaluasi yang bertujuan untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi.	Hasil evaluasi dalam penilaian ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi
	2. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi.	Hasil Evaluasi pengukuran jenjang organisasi
	3. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi.	Hasil evaluasi menganalisis duplikasi fungsi
	4. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok.	Hasil evaluasi dan analisis organisasi satu kelompok yang berbeda tujuan
	5. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan.	Hasil evaluasi pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan
	6. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan.	Hasil evaluasi kesesuaian struktur organisasi
	7. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat.	Hasil evaluasi kesesuaian struktur organisasi dengan mandat
	8. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan instansi lain.	Hasil evaluasi tumpang tindih fungsi instansi
	9. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis.	Hasil evaluasi terhadap perubahan lingkungan strategis
	B. Penataan	
	1. Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan	Perda tentang perubahan Struktur Organisasi.

	organisasi	
3.	Penguatan Akuntabilitas	
	A. Keterlibatan pimpinan	
	1. Apakah pimpinan terlibat secara langsung ada saat penyusunan Renstra	Dokumen yang menyatakan keterlibatan pimpinan dalam penyusunan Renstra
	2. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja	Dokumen yang menyatakan keterlibatan pimpinan dalam penyusunan Penetapan Kinerja
	3. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	Pencapaian Kinerja secara berkala
	B. Pengelolaan akuntabilitas kinerja	
	1. Sistem Pengukuran Kinerja telah dirancang berbasis elektronik	Dokumen Sistem Pengukuran Kinerja Berbasis elektronik
	2. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh seluruh unit	Dokumen Sistem Pengukuran Kinerja yang diakses seluruh unit
4.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	
	1. Standar pelayanan	
	1. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan.	Hasil reviu Standar Pelayanan
	2. Dilakukan reviu dan perbaikan atas SOP.	Hasil reviu SOP
5.	Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	
	1. Nilai Kapasitas Organisasi (survei internal)	Nilai survey internal
III	INSPEKTORAT	
1.	Gratifikasi	
	1. Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan	Laporan UPG secara berkala tentang praktik gratifikasi
2.	Pengaduan Masyarakat	
	1. Kebijakan pengaduan masyarakat	Peraturan Gubernur Sumbar tentang pengaduan masyarakat
3.	Penanganan Benturan Kepentingan	
	1. Penanganan Benturan Kepentingan.	Peraturan/kebijakan penanganan benturan kepentingan
	2. Penanganan Benturan Kepentingan Telah di sosialisasikan.	Laporan Sosialisasi Benturan Kepentingan
	3. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan.	Dokumen implementasi benturan kepentingan
	4. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan.	monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan
	5. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti.	Hasil Evaluasi benturan kepentingan yang telah ditindaklanjuti
4.	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	
	1. APIP berfokus pada <i>client</i> dan audit berbasis risiko	Audit berbasis risiko